

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁴

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu *النكاح*, dan *الزواج*, yang secara bahasa mempunyai arti *(الوطئ)* setubuh, senggama) dan *(الضم)* berkumpul¹⁵. Sedangkan menurut istilah Bahasa Indonesia adalah Perkawinan. Hal ini kerap kali dibedakan menjadi pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya Pernikahan dan Perkawinan hanya terdapat perbedaan dari segi

¹⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.9

¹⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.1461

pemahaman dan Bahasa saja. Perkawinan adalah: sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terang-kum atas rukun-rukun dan syarat-syarat¹⁶.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Keberadaan pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia diatas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah swt terhadap hamba-Nya, di antara firman Allah dalam QS.al-Nuur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya : *“dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui”*

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah

¹⁶ Kamal Mukhtar,Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta:Bulan Bintang,1974),hlm.79

merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*¹⁷.

Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.

Ulama Hanafiyah memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (istimta') dari wanita, dan yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah bukan makna yang hakiki. Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.

Sedangkan menurut ulama Shafi'iyah, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tajwiz atau semakna dengan keduanya.

¹⁷ (Ramulyo, 1996) (Meliala, 2006) (Islam D. J., 1998) (Rofiq, 1998) (Hamdani, 2002) (Abdurrahman, 1992) (Syarifuddin, 2007), Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.14

Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita Majusiyah, wanita Ahli kitab melalui sebuah ikrar.

Adapun disebutkan bahwa perkawinan menjadi suatu keharusan umat Muslim guna memenuhi sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Qur'an juga mengutuk pembujangan atau orang yang tidak mau atau tidak ingin melaksanakan pernikahan sebagai hasil perbuatan setan, dan begitu juga Nabi Muhammad SAW. Menikah berarti memenuhi sunnah Nabi yang dianggap penting. "Pernikahan adalah sunnah (peraturan)-ku, barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka ia bukan termasuk golongan (umat)-ku" (HR. Bukhari Muslim).

Pernikahan secara Umum

Perkawinan merupakan ikatan lahir maupun batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan tersebut merupakan rumusan yang tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut: "Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja

mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting...”

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974, pengertian perkawinan telah dirumuskan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun beberapa pendapat yang diberikan oleh Ahli Hukum Indonesia, seperti Subekti dan Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan juga mengenai pengertian perkawinan. Subekti mengemukakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁸ sedangkan pendapat dari Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perkawinan ialah yang berarti hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁹

Berdasarkan pendapat tentang perkawinan dari para ahli maka dapat di simpulkan, bahwa perkawinan itu tidak hanya sebagai ikatan dari lahir saja atau

¹⁸ Paul Scholten dalam Djaya S. Meliala, Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Vrama Vidya Dharma, Bandung, 2006, hlm. 7

¹⁹ *ibid*

ikatan dari batin saja, akan tetapi pernikahan merupakan suatu gabungan dari ikatan keduanya. Ikatan lahir dalam perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.²⁰ Ikatan lahir ini tercipta dengan terlaksananya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi orang yang beragama Islam. Ikatan batin dalam perkawinan merupakan ikatan jiwa yang tercipta karena adanya kemauan yang sama antara dua belah pihak dan dilakukan dengan secara ikhlas oleh seorang pria dengan seorang.²¹

Adapun dalam hal ini tujuan perkawinan antara lain:

- a. Tujuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat

²⁰ *ibid*

²¹ *ibid*

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²²

b. Tujuan Berdasarkan Hukum Islam

Tujuan menurut hukum Islam ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi, tujuan perkawinan menurut hukum Islam, yaitu:

- a) Untuk menegakan Agama, hal ini dapat diartikan bahwa menaati perintah dan larangan Allah SWT;
- b) Untuk mendapatkan sebuah keturunan, dalam hal ini berarti dapat meneruskan atau menambah ummat Islam
- c) Untuk menghindari dan mencegah maksiat dan fitnah, dalam arti untuk menciptakan keluarga yang damai dan teratur

2. Dasar Hukum Perkawinan

Memperhatikan dari rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum pula tujuan dari sebuah perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan kekal abadi. Dalam hal berarti bahwa setiap perkawinan yang telah terjalin bukan untuk suatu hubungan yang

²² Undang-Undang No 1 Tahun 1974

sementara atau untuk jangka waktu yang telah di tentukan oleh dua belah pihak, akan tetapi pernikahan yang bertujuan untuk mempunyai komitmen seumur hidup atau selama-lamanya dan tidak boleh diputus begitu saja oleh kedua belah pihak, sebab tidak diperbolehkan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk waktu yang telah di tentukan kapan berakhirnya pernikahan tersebut, contohnya seperti kawin kontrak.

Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Kemudian dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini memiliki arti, bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berikut penjelasannya menyatakan sebagai berikut: “Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam penjelasannya dinyatakan, bahwa dengan rumuan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Seperti yang diketahui bahwa pernikahan sangat menjunjung keabsahannya dalam prosesnya. Sahnya suatu perkawinan terdapat dua unsur,

yaitu; (a) perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan (b) hukum agama. Hal ini berarti apabila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang Negara saja tanpa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut dianggap tidak sah, demikian juga sebaliknya. Pengaruh pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, yang mana di dalam suatu prosesi perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pencatatan ini juga akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut.

Disebutkan pula di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.16 tahun 2019 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ”perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun.²³” Pernikahan untuk usia yang dibawah umur dari yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan memang dibolehkan

²³ Undang-Undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999).

demi kemaslahatan. Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode maslahah mursalah. Namun demikian, karena sifatnya yang ijtihad, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar.

Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta Dispensasi Kawin. Dalam hal siapa yang akan memberikan pengecualian atau dispensasi, maka dikeluarkanlah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat (2) yakni dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.²⁴

Secara yuridis normatif diketahui bahwa tidak bersifat mutlak patokan usia kawin yang telah dipersyaratkan undang-undang. Terdapat berbagai macam yang berbeda-beda dalam standar usia dibawah umur yang mengatur tentang pernikahan. Hal ini dikarenakan bahwa standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi yang diajukan oleh orang tua anak perempuan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan dispensasi

²⁴ Ahmad Rofiq, M.A, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 78.

kawin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Bab IV Pasal 14 telah tertulis sebagai berikut:

a. Syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun syarat sah nya dalam pernikahan yaitu sebagai berikut:²⁵

1) Calon Suami.

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat berikut yaitu:

- a) Bukan mahram dari calon Istri
- b) Tidak Terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas Orangnya
- d) Tidak Sedang Ihram haji

2) Calon Istri

Syarat Bagi seorang calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat berikut yaitu:

²⁵ Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

- a) Tidak bersuami
 - b) Bukan Mahram
 - c) Tidak saat masa Iddah
 - d) Merdeka (Atas kemauan sendiri)
 - e) Jelas orangnya
 - f) Tidak sedang Ihram Haji
- 3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Waras akalnya
 - d) Tidak di paksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang Ihram Haji
- 4) Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang di ucapkan oleh wali, sedangkan Kabul adalah sesuatu yang di ucapkan oleh mempelai Pria atau wakilnya yang di saksikan oleh dua orang saksi.

- 5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' Ayat 4 yang berbunyi

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”²⁷ (QS. An Nisa': 4)

Didalam KHI Pasal 30 disebutkan juga bahwa: “calon mempelai pria wajib membayar atau memberikan mahar berupa uang, barang atau sejenisnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.”²⁸ Dalam hal ini yang bertujuan untuk kebahagiaan kedua belah pihak di dunia dan akhirat dan juga untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawwadah Warahmah.

²⁶ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

²⁷ QS AN Nisa' ayat 4

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 30

b. Rukun Perkawinan

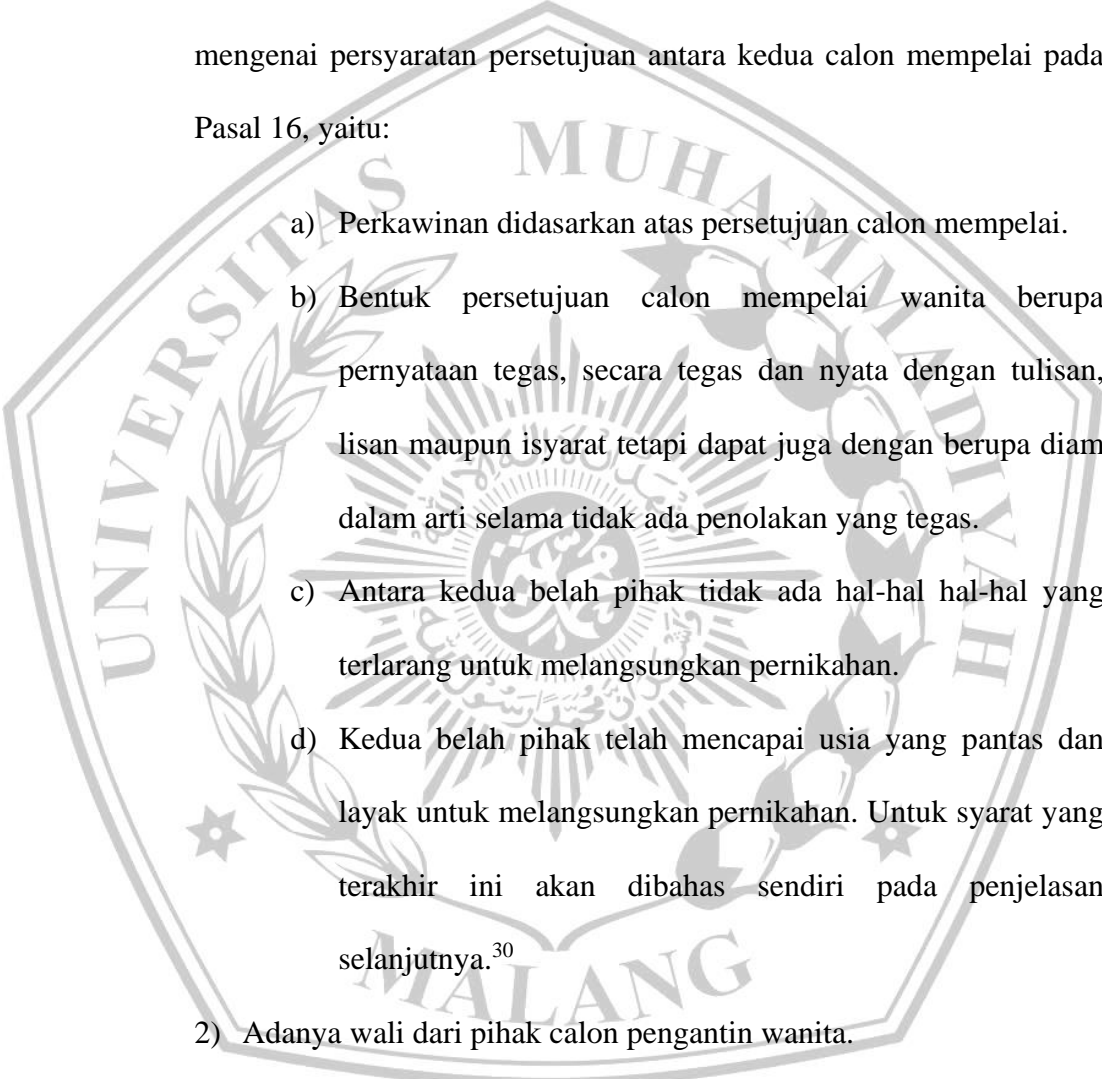
Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam suatu pernikahan, juhur ulama menyebutkan ada empat, yaitu:²⁹

- 1) Adanya calon istri maupun suami yang akan melangsungkan sebuah perkawinan. Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi oleh kedua calon mempelai adalah:
 - a) Calon mempelai istri maupun suami yang akan melangsungkan sebuah perkawinan harus sama-sama yang beragama Islam.
 - b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kedua calon mempelai. Dengan adanya syariat peminangan sebelum adanya suatu perkawinan, kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal atara satu sama lain dengan secara baik terbuka.
 - c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan

²⁹ Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, Hal. 46.

dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan sebuah perkawinan ulama fiqih berbeda pendapat dalam menyikapinya

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan antara kedua calon mempelai pada Pasal 16, yaitu:

- 
- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 - b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas, secara tegas dan nyata dengan tulisan, lisan maupun isyarat tetapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
 - c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
 - d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.³⁰
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, sabda Nabi saw.:

³⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), 64.

”Diriwayatkan dari Hasan dari Ibn Lahi’ah dari Ja’far ibn Rabi’ah dari Ibn Syihab dari ’Urwah ibn al-Zubair dari ’Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”. (HR. Ahmad)³¹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a) Orang merdeka (bukan budak)
- b) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

³¹ (Nuriy, 1419) (Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010) (Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010) (Andi Zainal Abidin, dkk), Kitab Baqi’ Musnad Ahmad, (‘Amman: Dar ‘Alamil Kutub, 1419), 23236.

- c) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- d) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya ,Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”.
- e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur ‘alaih). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- f) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari “Aisyah menurut riwayat Al Qutni menjelaskan bahwa ,Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.”
- g) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya,

karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.

- h) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim.

Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu). (QS. Ali Imran: 28).”³²

3) Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari dari

³² QS. Ali Imran ayat 28

syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat Al Talaq ayat 2 yang artinya :

“Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS. Al Talaq: 2).”³³

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan hanafiyah

³³ QS At Talaq ayat 2

berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

- b) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
 - c) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muru'ah.
 - d) Saksi harus beragama Islam.
 - e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
 - f) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- 4) Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Didalam Hukum Islam, perkawinan seseorang tidak sekedar sebagai telah terjadinya suatu terjadinya sebuah ikatan keperdataan yang baru. Tetapi perkawinan berarti lebih dari itu. Sebuah Akad dinyatakan sebagai perjanjian kuat yang di sebut dengan ungkapan *misaqan galizan* dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan

haya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung juga oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- a) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua.
- b) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.
- c) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.

- d) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.³⁴

B. Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin

1. Batasan Umur Untuk Melakukan Perkawinan

a. Ukuran Dewasa dalam Hukum Perdata

Adanya standar Batasan angka sebagai ukuran batas maksimal seseorang dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa atau masih dibawah umur ditentukan secara berbeda-beda oleh setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur. Adanya peraturan undang-undang yang menggunakan angka berbeda antara Perempuan dan Laki-Laki.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “seorang anak disebutkan apabila belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tak lebih dahulu telah melakukan kawin.”³⁵ Dalam hal ini berarti, bahwa kedewasaan seseorang dikaitkan dengan adanya suatu kecakapan melalui tindakan hukum atau sebuah perbuatan hukum. Maka pembuat undang-undang (BW) berpacuan dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun (atau telah kawin) sudah dapat merumuskan kehendaknya

³⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 62.

³⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 KUHPerdata

dengan benar dan sudah dapat menyadari serta mempertanggungjawabkan akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum (*handelings-bekwaam*). Karena dalam pandangan nya tidak selalu sesuai dengan kenyataan maka ketentuan usia dewasa bisa tidak sesuai dengan realitanya.

Bisa saja ada di antara mereka yang sudah berusia 21 tahun, masih tetap belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum dapat secara umum mengukur akibat hukum dari tindakannya. Namun demikian, kepastian hukum agar tidak ada keraguraguan mengenai kecakapan bertindak seseorang maka ditetapkan saja viii ukuran 21 tahun oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).³⁶

Kemudian patokan angka sebagai ukuran standar umur dewasa bagi wanita dan pria untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu cenderung menyamaratakan antara wanita dengan pria, misalnya pada Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 1 Angka 26 yang menetapkan bahwa “anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) Tahun”³⁷. Dalam undang-undang ketenaga kerjaan angka 18

³⁶ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur, Nasional Legal Reform Program*, Jakarta, 2010, hlm. 9-10

³⁷ Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

tahun untuk Wanita dan Pria, dinilai sudah dewasa atau sudah dapat dipekerjakan.

Adapun Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menggunakan angka 18 tahun dan masih banyak lagi Undang-Undang yang mengatur tentang Ukuran Dewasanya. Beragam nya penentuan angka standar umur di bawah umur menurut versi undang-undang secara berbeda-beda menjadi salah satu permasalahan dalam menentukan angka standar maksimal seseorang anak masih dapat dinyatakan di bawah umur.

Terjadinya variasi angka batas maksimal seseorang dinyatakan masih di bawah umur oleh perundang-undangan dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang konsep “kecakapan seseorang dalam bertindak menurut hukum” baik menyangkut kepentingan dirinya sendiri maupun terhadap harta bendanya. Kecakapan bertindak menurut hukum dimaksudkan sebagai “kemampuan seseorang merumuskan dengan benar tentang apa yang dikehendaki atas tindakannya” sekaligus “mampu mengisyafi akibat hukum yang akan terjadi dari tindakannya itu”³⁸. Dalam hal ini itulah yang menjadi salah satu fator berbedanya Undang-undang yang menentukan batas umur seorang anak. Ada

³⁸ Ade maman Suherman dan J. Satrio, Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Umur), Nasional Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 210, hlm 8.

yang membedakan secara tolak ukur gender maupun yang menyamaratakan gender.

Kecakapan seseorang yang dimaksudkan sudah dewasa dalam bertindak menurut hukum juga menjadi konsentrasi kajian bukan hanya dalam hukum keperataan, tetapi hal ini juga menjadi suatu pertimbangan dalam ilmu hukum pidana, apabila hanya kecakapan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana memiliki arti bahwa seseorang dianggap cakap atau dengan istilah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dapat diperhitungkan apakah seseorang tersebut berperilaku maupun berfikir bahwa tindakannya itu sesuai atau tidak dengan hukum, sehingga hal tersebut termasuk dengan adanya kesengajaan melakukan tindakan tertentu³⁹.

Berdasarkan konsep dari kecakapan tingkat kedewasaan seseorang ini yang membuat legislative merumuskan berbagai undang-undang, khususnya pasal-pasal yang merumuskan sebuah standar patokan yang menjadi tolak ukur apakah seseorang yang dikatakan masih di bawah umur atau sudah cakap atau dianggap dewasa. Sehingga dalam hal ini adapun terdapat beberapa perbedaan di dalam rumusan undang-undang yang disebabkan karena seseorang dianggap cakap bertindak untuk melakukan sebuah perkawinan, namun belum tentu dikatakan cakap untuk menjadi tenaga kerja dan pula untuk melakukan

³⁹ Andi Zainal Abidin dkk., Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana dan beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus), Penerbit Bersama Prapantja-Jakarta dan Taufeq-MakassarT.Th., hlm 35-36.

tindakan-tindakan sendiri di hadapan pengadilan, demikian seterusnya. Dalam perundang-undangan, seseorang dinyatakan tidak cakap (usia belum genap 18 tahun) menjadi tenaga kerja sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 1 angka 5 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menggunakan angka 18 tahun. Penentuan angka 18 tahun berbeda dengan tidak cakap (usia belum genap 21 tahun) untuk membuat perjanjian-perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW. Namun kebanyakan peraturan perundang-undangan menggunakan standar patokan umur 18 tahun untuk dijadikan patokan mengenai kedewasaan dan kebelumdewasaan seseorang dibandingkan dengan yang menggunakan patokan 21 tahun (di atas 18 tahun), sehingga dapat disimpulkan bahwa paradigma perundang-undangan lebih banyak atau mendominasi menggunakan standar patokan 18 tahun dalam menentukan kedewasaan dan kebelumdewasaan seseorang dianggap cakap dalam melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Bahkan para praktisi hukum di beberapa pengadilan, dalam menentukan angka (secara umum) sebagai standar patokan batas maksimal seseorang dikatakan di bawah umur (belum cakap bertindak menurut hukum) juga berbeda-beda seperti yang menggunakan patokan belum genap umur 21 tahun dinyatakan di bawah umur.

b. Ukuran Dewasa Untuk Melakukan Perkawinan

Adapun halnya dalam kitab BW (*burgerlijk wetboek*) menetapkan anak perempuan yang berumur 15 dan 18 tahun untuk Laki-Laki sudah diperbolehkan untuk melakukan suatu perkawinan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga membedakan yaitu 16 bagi Perempuan dan 19 tahun bagi Laki-Laki. Adapun perubahan mengenai Batasan umur terbaru yang telah di atur dan di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa Batasan umur untuk menikah untuk Laki-laki dan Perempuan adalah 19 Tahun dan yang lebih berbeda lagi adalah bahwa ketentuan dari ajaran Islam yang tidak menggunakan patokan umur sebagai batas seorang Perempuan dan Laki-Laki untuk melakukan pernikahan, melainkan mengambil ukuran dari baligh nya seseorang.

Dalam menentukan batas usia dibawah umur untuk kawin juga terdapat perbedaan antara ketentuan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan dalam BW. Dalam Pasal 7 undang-undang perkawinan menggunakan patokan umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Sedangkan Pasal 29 BW menggunakan patokan umur 15 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi pria. Kemudian dalam ajaran Islam sendiri tidak menentukan patokan umur dalam pernikahan, melainkan patokan baligh. Dalam hal ini pengertian baligh merupakan istilah dalam Hukum Islam yang

menunjukkan seseorang yang telah mencapai suatu kedewasaan⁴⁰. Kata "Baligh" sendiri diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya dari arti itu adalah bahwa seorang anak telah sampai di usia seseorang pada tahap kedewasaan. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila: (a) mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk; (b) telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah (bagi laki-laki) (c) telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami "menstruasi". (bagi perempuan).

Tujuan menurut hukum Islam ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi, tujuan perkawinan menurut hukum Islam, yaitu:

- a) Untuk menegakan Agama, hal ini dapat diartikan bahwa menaati perintah dan larangan Allah SWT;
- b) Untuk mendapatkan sebuah keturunan, dalam hal ini berarti dapat meneruskan atau menambah ummat Islam
- c) Untuk menghindari dan mencegah maksiat dan fitnah, dalam arti untuk menciptakan keluarga yang damai dan teratur

⁴⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Baligh>

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 KUH perdata menyebutkan bahwa: “seorang anak disebutkan apabila belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tak lebih dahulu telah melakukan kawin.” Dalam hal ini berarti, bahwa kedewasaan seseorang dikaitkan dengan adanya suatu kecakapan melalui tindakan hukum atau sebuah perbuatan hukum. Maka pembuat undang-undang (BW) berpacuan dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun (atau telah kawin) sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari serta mempertanggungjawabkan akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum (*handelings-bekwaam*). Karena dalam pandangan nya tidak selalu sesuai dengan kenyataan maka ketentuan usia dewasa bisa tidak sesuai dengan realitanya.⁴¹

Bisa saja ada di antara mereka yang sudah berusia 21 tahun, masih tetap belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum dapat secara umum mengukur akibat hukum dari tindakannya. Namun demikian, kepastian hukum agar tidak ada keraguran mengenai kecakapan bertindak seseorang

⁴¹ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur, Nasional Legal Reform Program*, Jakarta, 2010, hlm. 9-10.

maka ditetapkan saja viii ukuran 21 tahun oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Untuk mewujudkan tujuan pernikahan diatas bahwa perlu diketahui adanya prinsip perkawinan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan pernikahan diatas. Menurut Prinsip-prinsip perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan antaranya.⁴²

- a) Suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, yaitu kesejahteraan spiritual dan material
- b) Perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan.
- c) Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d) Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon sumai istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

⁴² Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga islam di Dunia Islam, 2005 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 172. (R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio , 1996)

- e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.⁴³

Maka dari itu bahwa yang telah disebutkan diatas bahwa kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa bertanggung jawab dalam suatu rumah tangga untuk menghadapi problem permasalahan-permasalahan yang akan datang nanti didalam kehidupan berumah tangga.

Kedewasaan juga merupakan salah satu faktor yang mendorong dari terbentuknya dan terciptanya keluarga yang Kekal dan Abadi menurut UU No.16 Tahun 2019 tentang Tujuan pernikahan dan menjadikan Keluarga yang Sakinnah Mawwadah dan Warahmah. Karena sangat pentingnya suatu kebersamaan dan kekompakan dalam menjalin hubungan suami istri maupun untuk membangun sebuah rumah tangga, maka seseorang yang akan melakukan perkawinan harus mempunyai perisapan yang matang dalam segala

⁴³ Republik Indonesia, Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

bidang. Persiapan ini berkaitan tentang kedewasaan seseorang untuk mempersiapkan diri untuk membangun sebuah rumah tangga. Oleh karena itu untuk menentukan suatu kesiapan seseorang untuk melakukan perkawinan wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik.

Patokan batas kecakapan dan belum cakupnya seseorang untuk melangsungkan perkawinan menyebabkan munculnya berbagai penafsiran atau interpretasi terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Di samping itu, patokan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) tidak bersifat mutlak (hanya bersifat anjuran), bahkan syarat batas umur tersebut dilunakkan dengan membuka jalan untuk memberikan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yang sifatnya istimewa/mendesak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 29 BW bagi yang perkawinannya tunduk pada BW. Adanya perubahan mengenai Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyebutkan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya di

izinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun.

Oleh karena itu, penafsiran terhadap angka sebagai patokan di bawah umur untuk dapat diberikan dispensasi kawin menjadi tidak jelas, akan tetapi yang jelas patokannya adalah antara setelah baligh sampai belum genap umur 16 tahun bagi wanita dan antara setelah mimpi basah dengan 19 tahun bagi pria, jadi bisa 14 tahun, 15 tahun asalkan sudah baligh disertai alasan-alasan tertentu yang sifatnya mendesak

Walaupun dalam aturan tertulis UU no 16 Tahun 2019 melarang perkawinan yang dilakukan dibawah umur 19 Tahun pada Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan, namun Undang-Undang Masih memberi celah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Yaitu dengan mengajukan Permohonan Izin Dispensasi Kawin pada Pengadilan. Untuk seseorang yang beragama Islam bisa mengajukan Permohonan Izin Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama dan untuk seseorang yang tidak beragama Islam bisa mengajukan Permohonan Izin Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri. Seperti yang telah di jelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019 dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan.

2. Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin

Dispensasi (*Despentatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban atau pengecualian dari suatu peraturan.⁴⁴ Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.

Menurut Subekti dan Tjitosubodo yang telah di terangkan di dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum makna dispensasi menyatakan bahwa penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku, seiring dengan itu menurut Roihan A. Rasyid makna dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, Dispensasi Kawin diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.⁴⁵

⁴⁴ (Rasyid, 1998) (Sri, Februari 2016) (Aisyah, Desember 2017) (Mertokusumo, 2013) (Wahyudi, 2018), 1996), 36.

⁴⁵ Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ,1998), 3

Dispensasi usia perkawinan memiliki arti sebuah keringanan dari sesuatu aturan yang mengatur mengenai batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Untuk calon suami istri yang ingin melakukan sebuah perkawinan di bawah umur, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dalam hal ini adapun beberapa ketentuan nya, yaitu:

- a) Permohonan Dispensasi Kawin harus diajukan calon suami istri yang belum memenuhi batas minimal usia nikah dan/atau orang tua yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama.
- b) Permohonan dispensasi nikah dapat dilakukan bersama-sama antara calon suami dan istri ke Pengadilan.
- c) Pengadilan dapat memberi dispensasi nikah setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.

- d) Permohonan dispensasi nikah bersifat *Voluntair* produknya berbentuk penetapan.⁴⁶

Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam memberikan Dispensasi Kawin adalah;

- a) Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yang kemudian di perbaharui oleh Undang-Undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2, yang berbunyi "Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita"⁴⁷
- b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat 2 huruf (a), (b) dan (c), yaitu; Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat 1, Pegawai Pencatat Nikah meneliti pula bahwa:
- Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asalusul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

⁴⁶ Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama , Buku II , (t.tp., t.p., t.t.), 120.

⁴⁷ Undang - undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan .,

- Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai
- Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 tahun.⁴⁸

c) Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal 13, yaitu:

- (1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama
- (2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya.
- (3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

⁴⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

(4) Selain penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.⁴⁹

Dari apa yang telah di sebutkan diatas terdapat aturan-aturan yg mengatur tentang Permohonan Dispensasi Kawin. Kemudian Pejabat yang berwenang bisa memutuskan di Kabulkan atau Ditolak nya Permohonan Dispensasi Kawin itu sendiri. Maka dari itu untuk menindak lanjuti di Kabulkan atau Ditolaknya permohonan Dispensasi Kawin maka dilakukanlah persidangan dengan acara yang singkat untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan dibawah umur tersebut. Disini hakim berperan penting dalam mempertimbangkan hal-hal antara lain adalah seperti kemampuan, kematangan dari kedua calon mempelai, kesiapan baik mental maupun fisik. Kemudian hakim menetapkan diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin tersebut dengan didasarkan atas pertimbangan yang sangat terbuka, rasional, dan memungkinkan untuk mengabulkan Dispensasi Kawin tersebut kepada Pemohon maupun Calon Mempelai. Setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan hakim untuk memberikan dispensasi kawin tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu Penetapan.

⁴⁹ Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal 13 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan peraturan Undang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam.

Ketika hakim memberikan suatu Penetapan, hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang permasalahan yang sedang di perkarakan. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankannya, karena penetapan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.⁵⁰

Sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Ketika ingin menjatuhkan penetapan, hakim memiliki pertimbanganpertimbangan yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah:

1) Bukti Surat

- Foto copy Surat Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan.

⁵⁰ Ahyani Sri, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.34, No.1, Februari 2016, Hal 42.

- Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

2) Bukti Saksi

Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang. Namun karena dalam perkara ini perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka saksi hanya kalau dibutuhkan saja dalam memperkuat keterangan-keterangan yang telah di lampirkan. Dalam pertimbangannya, hakim juga berdasarkan hukum Islam yakni menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan dan Kemadharatan harus dihilangkan yang pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemadharatan. Pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak dapat di hilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari apa yang terjadi.⁵¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa hakim lebih mempertimbangkan kebaikan untuk kebaikan kedua calon mempelai itu sendiri maupun untuk calon keluarga yang akan dibina oleh kedua calon mempelai

⁵¹ *ibid*

itu sendiri. Karena sesungguhnya tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, rukun dan kekal.

b) Pertimbangan Keadilan Masyarakat.

Seringkali pernikahan dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi, yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di Pengadilan Agama, hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan di dalam masyarakat. Hal ini dapat berakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan akan lebih mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya. Hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kekuasaan dan otoritas dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan disamping itu juga, dalam membuat putusan hakim harus mempertimbangkan segala temuan yang ditemukan didalam persidangan dan semua temuan nya harus sungguh-sungguh di pertimbangkan.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan antara undang-undang yang ada dengan fakta dalam persidangan. Dalam perkara

dispensasi kawin peraturan yang mengatur batasan usia seseorang yang dibolehkan melakukan pernikahan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian telah di perbaharui menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum, dapat mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan agama. Aturan lain yang mengatur dispensasi kawin adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasannya.

Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan pemberian dispensasi kawin terhadap pemohon mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mana pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Berdasarkan pada analisis pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan dispensasi kawin mempunyai beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan hakim yang berdasarkan pada peraturan yang ada yang mana dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapannya itu harus disesuaikan dengan hukum yang ada. Selain itu, dalam menetapkan izin dispensasi kawin yaitu dalam mengambil penetapan hakim mengali berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi kemudian dari keterangan saksi-saksi tersebut dicocokkan dengan

keterangan dari pemohon, saksi yang biasa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang. Di dalam Agama Islam, dalam hal ini bersikap keras tak mengenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita menjerumuskan kelembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas yang apabila tidak segera diobati akan mengrogoti tubuh manusia sampai mati oleh karena itu pencegahan bersikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam memerangi kemaksiatan tersebut,⁵² dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Menurut persepsi hakim, mudharatnya adalah ditakutkan apabila tidak di nikahkan akan menambah dosa dan dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan menurut undang-undang.

⁵² Ibid, Dudung Abdul Rohman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjadi Moralitas Bangsa Menuju Pandangan Al-Quran, Nuansan Aulia, Bandung, 2006, hal.36

3. Alasan-alasan memberikan Dispensasi Kawin

Telah di sebutkan didalam Pasal 7 ayat (2) Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Maksud dari penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini adalah pihak wanita dan pria yang belum genap berumur 19 tahun. Sedangkan yang dimaksud dari ‘Pengadilan yang ditunjuk’ oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita adalah bagi yang beragama Islam harus mengajukan permohonan Dispensasi ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama Kristen mengajukan ke Pengadilan Negeri. Sekalipun terbuka jalan untuk diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi.

Diharapkan pengaturan secara jelas dan rinci melalui Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun peraturan pelaksanaan dimaksud juga tidak merinci alasan-alasan pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umun, melainkan hanya menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti secara saksama tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan

perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) huruf e bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti beberapa dokumen/keterangan sebagai syarat melangsungkan perkawinan, salah satu di antaranya adalah dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai maksud Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019.

Logika hukum dari hukum perkawinan sehingga tidak merinci secara jelas dan detil tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena alasan-alasan tersebut sangat variatif sifatnya seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi.

Maka dari itu, penulis mencoba mengungkap alasan-alasan pemberian dispensasi kawin anak di bawah umur melalui pencermatan beberapa Penetapan Pengadilan Agama sebagai sampel dari berbagai Penetapan Pengadilan Agama yang dipilih secara probabity (acak) dengan argumen bahwa hampir semua alasan yang digunakan Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan dispensasi kawin adalah homogen.

Disini penulis juga mencoba mencari faktor-faktor apa yang menyebabkan banyaknya permohonan Dispensasi Kawin. Antara lain nya adalah;

a) Faktor Hamil Di Luar Nikah.

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini terjadi paku tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa.

Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, hal ini mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudia beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Saat ini, banyak remaja kurang mendapatkan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah. tentang masa subur dan resiko kehamilan.

Sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan itu akan semakin meningkat, walaupun pada kenyataannya remaja tersebut masih belum mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan. Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya.

Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu. Bahkan kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, yakni ancaman buat masa depan, bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor penyebab, diantaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang masih ada di usia remaja, di karenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya

pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua.

b) Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka kawin dini dan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama setiap tahun nya hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat yang rendah inilah yang menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya adalah sebuah dari solusi untuk meringankan beban hidup keluarganya.

Kemudian hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi perkawinan di pengadilan.

c) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktivitas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa adanya petanggung

jawaban. Akibat lanjutnya produktivitas kerjanya pun sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya, Karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk dimenikah diusia yang tergolong muda.

Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.

Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah diusia yang dini, namun hal ini yang tidak ada dalam pemikiran orang tua anak, pemikiran-pemikiran untuk menikahkan anaknya diusia dini cukup melekat pada masyarakat pedesaan, mereka tidak bisa melihat perempuan bekerja diluar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur saja, hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan mereka para orang tua lebih baik meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Dalam sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan khususnya orang miskin , dalam hal ini orang tua pemohon, mereka menganggap ketika anak sudah baliq (Dewasa) secara agama islam, maka bagi mereka sudah selayaknya dinikahkan untuk mengurangi beban keluarga.⁵³

C. Tinjauan Tentang Penetapan Pengadilan Agama

1. Output dari Putusan dan Penetapan.

a) Putusan

Putusan dalam keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi. Putusan harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dengan adanya putusan yang diucapkan oleh majelis hakim berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar.⁵⁴

Adapun beberapa jenis macam-macam putusan yaitu:

⁵³ Nur Aisyah, Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng, *Yurisprudentie*, Vol. 4 No 2 Desember 2017, Hal. 180-182

⁵⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2004. Hlm 167-168

a. Putusan Sela yaitu putusan yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Putusan sela dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Putusan praeparatoir yaitu sebagai persiapan putusan akhir, tanpa memiliki pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
- 2) Putusan interlocutoir yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.
- 3) Putusan insidentil yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden yakni peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa, putusan ini belum berhubungan dengan pokok perkara.
- 4) Putusan provisionill yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisionill yakni permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir diajukan.

b. Putusan akhir yaitu putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan. Putusan akhir dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Putusan Comdenatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi

- 2) Putusan Constututif adalah putusan yang meniadakan atau mennciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya pemutusan perkawinan, pernyataan pailit dan pemutusan perjanjian.
- 3) Putusan Declaratoir adalah putusan yang isinya menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalag anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah⁵⁵.

Isi putusan dapat berupa:

1. Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaad* atau N.O) karena:
 - Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur liebel*)
 - Gugatan tidak berdasar hukum/melawan hak
 - Gugatan prematur/belum saatnya
 - Gugatan nebis in idem
 - Gugatan error in persona
 - Gugatan telah lampau waktu/kadaluwarsa
 - Pengadilan tidak berwenang.⁵⁶
2. Gugatan dikabulkan

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2013, hlm 240-242

⁵⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju), 2018, hlm 162

Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang di ajukan penggugat terbukti kebenarannya dan tidak disangkal tergugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya akan dikabulkan seluruhnya, namun jika gugatan terbukti sebagian, maka gugatan dikabulkan oleh hakim hanya sebagian.

3. Gugatan ditolak

Gugatan ditolak disebabkan karena bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya di dalam persidangan dan gugatannya melawan hak, maka gugatan akan ditolak dan atau akan dinyatakan tidak dikabulkan⁵⁷.

4. Gugatan digugurkan

Gugatan digugurkan apabila dalam persidangan penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara gugatan digugurkan.

5. Gugatan dibatalkan

Gugatan dibatalkan apabila panjar biaya perkara telah habis dan penggugat telah ditegur supaya membayar biaya panjar perkara apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan tidak diindahkan maka

⁵⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Garafika), 2016, hlm 223

dibuat penetapan perkara gugatan dibatalkan dengan membebankan biaya perkara kepada penggugat.⁵⁸

Adapun kekuatan putusan sebagai berikut :

- a. Kekuatan mengikat yaitu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diganggu gugat lagi, putusan ini memiliki kekuatan pasti
- b. Kekuatan pembuktian yaitu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti
- c. Kekuatan eksekutorial yaitu putusan yang memiliki kekuatan tetap, memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Hanya putusan condemnatoir saja yang memerlukan eksekusi⁵⁹.

b) Penetapan

Penetapan adalah salah satu produk Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Penetapan merupakan keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk

⁵⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*,. (Bandung: CV. Mandar Maju) 2018 Hlm 169-170

⁵⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), 2001. Hlm 210-211

menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat *declaratoir* yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial⁶⁰.

Adapun macam-macam jenis penetapan, yaitu:

a. Penetapan murni dalam bentuk *voluntaria*.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penetapan merupakan hasil dari perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak. Inilah yang dimaksud dengan perkara murni *voluntaria*. Secara singkat cirinya adalah:

- 1) Merupakan gugat secara “sepihak” atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja.
- 2) Tidak ditunjukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.
- 3) Petitum dan Amar putusan bersifat “*deklatoir*”

b. Penetapan bukan dalam bentuk *voluntaria*.

Selain penetapan dalam bentuk murni *voluntaria*, di lingkungan Peradilan Agama ada beberapa jenis perkara di

⁶⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju) 2018 Hlm 169-170

bidang perkawinan yang produk Pengadilan Agamanya berupa penetapan, tapi bukan merupakan voluntaria murni. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan.

Selain dari kedua jenis di atas, ada juga penetapan Hakim yang tidak dimaksudkan sebagai produk Peradilan, namun hanya bersifat teknis administratif dalam praktik beracara di Pengadilan. Contoh dari jenis ini, misalnya: penetapan hari sidang, penetapan perintah sita jaminan, Penetapan Perintah Pemberitahuan Isi Putusan dan lain sebagainya. Karena bukan merupakan produk peradilan, maka penetapan semacam ini tidak perlu diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁶¹.

⁶¹ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1996, hlm 245 (Mardani, 2009) (Ali, 2006)

2. Macam-macam Produk Putusan dan Penetapan Hakim Pengadilan Agama


Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara, maka ia harus mengadilinya atau membeikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk-produk hukum di lingkungan peradilan agama pada prinsipnya dengan produk-produk di lingkungan peradilan umum, yang pada umumnya sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama menyebutkan:

“ Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

Dalam pasal ini berarti bahwa Pengadilan Agama hanya memiliki 2 bentuk produk hukum yaitu Putusan Dan Penetapan Hakim. Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan putusan terdiri dari tiga, yaitu;

- i. Diklatoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan diklatoir berbunyi “Menetapkan...”. Putusan diklatoir terjadi dalam putusan sebagai berikut:

- a) Permohonan talak

- 
- b) Gugat cerai karena perjanjian ta'lik talak
 - c) Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya
 - d) Penetapan ahli waris yang sah
 - e) Penetapan adanya harta Bersama
 - f) Perkara-perkara valunter dan seterusnya.
- ii. Putusan konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Amar putusan konstitutif berbunyi “menyatakan...” dan putusan terdapat pada putusan-putusan sebagai berikut:
- a) Putusan gugur, ditolak dan putusan tidak di terima
 - b) Gugat cerai bukan karena tak'lik talak
 - c) Putusan verstek
 - d) Putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.
- iii. Putusan komdenatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Amar putusan kondemnatoir berbunyi “Menghukum...” putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yang bila ter hukum tidak mau melakukan isi putusan secara sukarela, maka atas permohonan penggugat, maka putusan dapat

dilaksanakan dengan paksa oleh pengadilan agama yang memutusnya. Amar putusan kondemnatoir yang ditetapkan dipengadilan agama antara lain:

- a) Penyerahan harta Bersama.
- b) Penyerahan hak nafkah iddah, mut'ah
- c) Penyerahan hak biaya alimentasi anak dan sebagainya

Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunteer). Penetapan merupakan *jurisdictio valuntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat *declaratoir* yaitu menetapkan atau menerangkan saja.⁶² Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili” namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”⁶³. Penetapan pengadilan Agama yang dikeluarkan adalah apabila adanya permohonan:

- a) Penetapan Dispensasi Kawin
- b) Penetapan Izin Nikah
- c) Penetapan Wali Adhal

⁶² Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, (Bandung: CV Madar Maju, 2018), hlm. 161

⁶³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 123

- d) Penetapan Poligami
- e) Penetapan perwalian
- f) Penetapan Isbat Nikah

3. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan/ mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/maslahah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan. Hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (fiqh) mengenai permohonan usia kawin,

perlu dipertimbangkan maslahat mursalah (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum)⁶⁴.

Hakim mengedepankan konsep maslahat murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Maslahat mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Quran dan sunnah, maupun ijma' ulama' terdahulu. Masalah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam hal ini hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara

⁶⁴ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 14

ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum diluar pagar pernikahan.

a. Pertimbangan Hakim

Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak⁶⁵.

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi

⁶⁵ Ibid, hal. 135.

hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan⁶⁶.



⁶⁶ Nur Aisyah, Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng, *Yurisprudentie*, Vol. 4 No 2 Desember 2017, Hal. 185